



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP
BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**





DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR LAMPIRAN	IV
KATA PENGANTAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan tujuan	3
C. Dasar Hukum	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1. Tugas Pokok	4
2. Fungsi	5
E. Struktur Organsasi Bappeda Kabupaten Purworejo	5
1. Susunan Organsasi	5
2. Badan organisasi Bappeda Kabupaten Purworejo	5
F. Sumber daya Bappeda Kabupaten Purworejo	8
1. Susunan Kepegawaian	8
2. Perlengkapan	11
G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo	13
1. Aspek Strategis Bappeda Kabupaten Purworejo	13
2. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo.....	14
H. Sistematika Penyusunan LKjIP	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021	16
B. Perencanaan Kinerja Bappeda Tahun 2020.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	25
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	26
2. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan	28
3. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya.....	35
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
B. Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2020..	46



BAB IV PENUTUP	52
A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo	52
B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-kendala dalam Pencapaian Tujuan.....	55
C. Langkah-langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pencapaian Tujuan	56

**DAFTAR TABEL**

			Halaman
1	Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	10
2	Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	10
3	Tabel 1.3	Kondisi Sarana dan Prasarana	11
4	Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	17
5	Tabel 2.2	Target Indikator Program Prioritas Tahun 2020	20
6	Tabel 2.3	Program dan Pagu Indikatif Program Th 2020 sebelum perub	23
7	Tabel 2.4	Program dan Pagu Indikatif Program Th 2020 refokusing covid -19	23
8	Tabel 2.5	Program dan Pagu Indikatif Program Th 2020 setelah perub	24
9	Tabel 3.1	Target dan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020	27
10	Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan yang Akuntable dan Tepat Waktu	28
11	Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2020	29
12	Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	30
13	Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	32
14	Tabel 3.6	Program dan Kegiatan	32
15	Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	33
16	Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Capaian Kinerja dan Keuangan	34
17	Tabel 3.9	Program dan Kegiatan Indikator	34



		Presentasi Penguatan SiDA	
18	Tabel 3.10	Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
19	Tabel 3.11	Analisis Program.Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
20	Tabel 3.12	Pagu dan Realisasi Tahun 2020	46
21	Tabel 3.13	Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020	46
22	Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2020	47
23	Tabel 4.1	Rekapitulasi realisasi kinerja bappeda taun 2020	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tahun 2020
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tahun 2020
3. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2020
4. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
5. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Purworejo (Murni dan Perubahan) Tahun 2020
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020
7. Laporan Pengawasan Anggaran definitif per Kegiatan Tahun 2020
8. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan 31 Desember 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita semua sehingga Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo berhasil disusun. Tanpa perlindungan dan rahmat Allah segala kesulitan dapat teratasi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Negara RI Nomor 4437) dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas guna mewujudkan Pemerintah yang “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2020, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Demikian Laporan Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Purworejo, 29 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. Bambang Jati Asmara, MT., MA

Pembina Tk. I
NIP. 19641025 199703 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi Dalam rangka melaksanakan era globalisasi di masa ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo selaku perencana pembangunan daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan yang “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan strategis dan manajemen kinerja. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi serta nepotisme menuju ke pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk



mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 juga telah dilakukan pengesahan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/499/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, sehingga secara substantif Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 menjadi tahun kedua, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 menjadi tahun ketiga dan tahun 2019 menjadi tahun keempat dan 2020 menjadi tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupten Purworejo dan Renstra Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.



2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/I/6/8/2003 tentang perbaikan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
16. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052 /2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas di tahun 2020, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok fungsi sebagai berikut :



1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian.

2. Fungsi

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan pengendalian;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah;
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mengordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang meliputi produksi,



pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang produksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.



4. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang penelitian, pengembangan dan analisa data, penyusunan perencanaan daerah serta pengendalian evaluasi dan pelaporan.

Fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penelitian pengembangan dan analisi data;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan daerah;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Purworejo

1. Susunan

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana daerah akan dibawa.



Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya dapat diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 38 orang PNS dan 4 orang Pegawai Tidak Tetap. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 1.1. berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1. dengan jenjang eselonering II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo bermitra dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melalui 2 (dua) bidang perencanaan yaitu bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Kedua bidang tersebut mengordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Satu bidang lain dengan eselonering yang sama.

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melalui 2 (dua) bidang perencanaan yaitu Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Kedua bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap kedua bidang diatas yaitu, Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian memberikan dukungan berupa penyediaan data-data dan hasil kajian dan monitoring dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.



Tabel 1. 1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	2	7	12
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	1	3	2	2	8
4.	Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	-	1	2	1	3	7
5.	Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	-	1	3	4	2	10
JUMLAH		1	4	10	9	14	38

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bappeda Kab. Purworejo

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV lebih sedikit daripada Bidang yang lain, Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah seharusnya memiliki 3 pejabat struktural Eselon IV tetapi pada bulan bulan Agustus Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha meninggal dunia sehingga jumlah eselon IV hanya 2, dan untuk Sekretariat jumlah karyawan lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup besar memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1/ DIV	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	-	5	-	1	12
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	2	4	-	2	-	-	8
4.	Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	2	2	-	3	-	-	7
5.	Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	2	5	2	1	-	-	10
JUMLAH		8	16	2	11	-	1	38

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo



Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo yang paling banyak adalah S-1 sebanyak 10 orang (34,2%). Tingkat pendidikan yang relative tinggi merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum. Jumlah karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 18,42% dari seluruh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi *Think Thank* nya Pemerintah Kabupaten Purworejo, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

2. Perlengkapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 64 Purworejo terdiri dari gedung kantor berlantai 2 seluas 1192,6 m², ruang pertemuan ada 2, gudang, tempat parkir dan halaman. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda 4	5	Baik
2	Kendaraan Roda 2	18	Baik
3	Gerobak dorong	1	Baik
4	GPS	1	Baik
5	Scanner	3	Baik
6	Rak penyimpanan	1	Baik
7	Mesin ketik manual	4	Baik
8	Rak besi	9	Baik
9	Rak Kayu	6	3 baik 3 rusak



No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
10	Filling besi	12	Baik
11	Kardek Kayu	1	Baik
12	Peti uang	1	Baik
13	Papan visuil	1	Baik
14	Layar OHP	1	Baik
15	White board	4	Baik
16	Mesin absensi	1	Baik
17	OHP	7	Baik
18	Kursi besi/metal	30	Baik
19	Meja/kursi tamu	4	Baik
20	Meja rapat	23	Baik
21	Meja tulis	52	Baik
22	Meja TIK	1	Baik
23	Kursi rapat	80	Baik
24	Kursi tamu	4	Baik
25	Kursi putar	30	Baik
26	Kursi lipat	54	Baik
27	Meja komputer	8	Baik
28	Kompor gas	1	Baik
29	Tabung gas	1	Baik
30	TV	1	Baik
31	Cassete recorder	1	Baik
32	AC	11	Baik
33	LCD	9	Baik
34	Note Book/Laptop	37	Baik
35	PC Unit	6	Baik
36	Printer	15	Baik
37	Camera	3	Baik
38	Almari Besi dan Kayu	31	Baik
39	Filling Besi	13	Baik
40	Pesawat Telepon/ Faks	3	Baik
41	Layar	2	Baik
42	Wireless	1	Baik

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Umum
Bappeda Kabupaten Purworejo

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda yang memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga dengan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas



pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai.

G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo

1. Aspek Strategis Bappeda Kabupaten Purworejo

Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN”

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religis dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi VI, yaitu



“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, yang meliputi Perekonomian, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan visi dan misi Bupati.

2. Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo

Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Purworejo terkait dengan pelayanan Perencanaan adalah;

- Adanya perubahan sistem perencanaan dari Kementrian Dalam Negeri yang terpusat menggunakan Aplikasi SIPD berpengaruh terhadap proses perencanaan yang merubah nomenklatur program dan kegiatan.
- Masih perlunya peningkatan kualitas produk perencanaan daerah;
- Belum berkembangnya budaya inovasi di masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan
- Adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan

H. Sistematika Penyusunan LKJIP Bappeda Purworejo

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, aspek strategis Bappeda Purworejo dan permasalahan utama yang dihadapi, dan sistematika penulisan LKJIP

BAB II : Perencanaan kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2020

BAB III : Akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja Bappeda Purworejo dan Realisasi Anggaran Bappeda Purworejo tahun 2020



BAB IV : Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Bappeda Purworejo tahun 2020 dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bappeda Purworejo tahun 2020.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2020
2. Target Kinerja RKPD (Murni dan Perubahan) Bappeda Purworejo tahun 2020
3. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Purworejo (Murni dan Perubahan) Tahun 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Purworejo Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan Tahun 2020
4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Purworejo Tahun 2020
5. Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran Bappeda Purworejo Tahun 2020



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo selaku Perangkat Daerah ditetapkan tujuan yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode 2016-2021 yaitu:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN DAN
EKONOMI KERAKYATAN**

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut di atas telah dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaen Purworejo sebagai gerbang yang religious dan demokratis
- b. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan
- c. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan local
- d. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga
- e. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan
- f. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik



- g. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

3. Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2016-2021

Untuk merealisasikan misi VI Bupati dan Wakil Bupati tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam rangka pencapaian RPJMD 2016-2021, Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai institusi perencana merumuskan tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** dan sasaran yang akan dijalankan yaitu :Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDA) dan meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda secara rinci terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	96	96	96	96,5	96,5	97	97
		Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	Persentase Penguatan SIDA	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: data Subag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum



4. Strategis dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Purworejo

Strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Purworejo harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Purworejo merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, sehingga dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, Bappeda Kabupaten Purworejo menetapkan strategi untuk pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah
- 2) Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDA) melalui optimalisasi jejaring Sistem Inovasi Daerah
- 3) Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata Kerja dan Ketatalaksanaan

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Purworejo adalah :

1. Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas, proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.
2. Optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah dengan menyediakan wahana publikasi serta penghargaan atas hasil-hasil inovasi masyarakat dan daerah, meningkatkan kwalitas koordinasi dan komunikasi antar jejaring Sistem Inovasi Daerah.
3. Peningkatan kwalitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata Kerja dan Ketatalaksanaan



B. PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tertuang melalui penetapan/ perjanjian kinerja yang disepakati pada tanggal 2 Januari 2020 yang mendasarkan pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 serta Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan kinerja tahunan tahun 2020 mengalami perubahan, khususnya pada sasaran dan indikator sasaran karena dilakukan penajaman dan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, khususnya yang menjadi prioritas di tahun 2020. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Setiap sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (*action plan*) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemetaan dari urusan dan kewenangan Kabupaten yang mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Purworejo melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Fungsi Penunjang



Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 6 program dan 6 indikator program sebagai berikut:

Tabel 2.2
TARGET INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2020

PRIORITAS		BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA CAPAIAN
Tata Kelola pemerintahan yang baik dan kondulsivitas daerah serta pengelolaan bencana	A.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN		
	1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	97%
Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	B.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Cakupan Penelitian dan Pengembangan	100%
Tata Kelola pemerintahan yang baik dan kondulsivitas daerah serta pengelolaan bencana	C.	NON URUSAN		
	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%
	2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%
	3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%
	4.	Program Peningkatan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	100%

Berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah disusun, tahun 2020 merupakan tahun kelima atas pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 dan tahapan pelaksanaan strategi, dengan program beserta program indikator sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu

Pada tahun 2020 diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu dengan target capaian 97%.

a. Definisi Operasional atas Indikator Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu mencakup 3 hal yaitu :

1. Akuntabilitas tingkat kabupaten (% realisasi kinerja) dengan bobot 25%, yaitu Akuntabilitas kabupaten/% realisasi kinerja
2. Ketepatan waktu tingkat kabupaten dengan bobot 50% yaitu Ketepatan waktu penyusunan Perencanaan di tingkat kabupaten
3. Ketepatan waktu tingkat perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah

Penjabaran dari sasaran terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu melalui 1 (satu) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Program Cakupan



Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 97%.

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Program Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi dokumen perencanaan umum pembangunan daerah, dokumen perencanaan teknis, dokumen pengendalian dan evaluasi serta dokumen kompilasi data sektoral

Adapun dokumen yang dibutuhkan meliputi :

- a. Dokumen perencanaan umum meliputi : Dokumen RPJMD, RKPD, beserta perubahannya.
- b. Dokumen Perencanaan Teknis adalah : Masterplan, Rencana Aksi, Studi Kelayakan, Perencanaan kebijakan lainnya.
- c. Dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD serta evaluasi RPJMD Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2020 dijabarkan melalui 10 (sepuluh) kegiatan.

2. Berdasarkan Sasaran : Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)

Pada tahun 2020 diupayakan pencapaiannya melalui indikator sasaran Persentase Penguatan SIDa dengan target capaian 100%. Tolok ukur kinerja berdasarkan tahapan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan dalam tahun 2020.

Definisi Operasional atas Indikator kinerja Sasaran Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) meliputi Sistem Inovasi Daerah, Penyelenggaraan Krenova, dan koordinasi Dewan Riset Daerah kabupaten Purworejo, penataan kelembagaan, jaringan dan sumber daya. Serta pengembangan komitmen dan konsensus, pemetaan potensi dan analisis serta pemberlanjutan penguatan SIDa atau secara ringkas meliputi :

- a. Kebijakan SIDa dengan bobot 40%, meliputi meliputi hasil koordinasi SIDa, data dan Informasi Iptek, dan Penataan jaringan SIDa yang disinergikan dengan RPJMD 2016-2021
- b. Penataan SIDa di tahun 2020 dengan bobot 35% meliputi Penataan Jaringan SIDa dan Penataan Sumber Daya SIDa , dengan Penyelenggaraan krenova di tahun 2020 dengan meliputi penyelenggaraan Kreativitas dan Inovasi masyarakat yang



ditujukan pada masarakat Purworejo yang memiliki inovasi dalam segala bidang.

c. Pengembangan SIDA dengan bobot 25%

Target pengembangan SIDA di tahun 2020 dengan membentuk dewan riset daerah (DRD) yang menghasilkan 1 buah dokumen hasil riset.

melalui 1 Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator Program Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan dengan target 100%.

Definisi Operasional dari Program Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator Kinerja Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan meliputi Penelitian dan pengembangan yang seharusnya dilaksanakan. Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan di tahun 2020 dijabarkan melalui 1 (satu) kegiatan.

Secara menyeluruh, baik pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan berdasarkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan indikator kinerjanya di tahun 2020, dijabarkan melalui 6 (enam) Program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud telah mengalami perubahan dari program kegiatan awal tahun baik berupa penambahan dan pengurangan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Perubahan ini merupakan refleksi atas dinamika kondisi dan kebutuhan yang terjadi dalam tahun 2020. Seiring dengan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 mengalami perubahan anggaran sebanyak dua kali dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi *refocusing* anggaran pada bulan Maret dan anggaran perubahan pada pertengahan tahun. Adapun program dan pagu Anggaran Definitif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebelum *refocusing* dan perubahan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 :

Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2020

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN			2.628.661.700
	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.628.661.700
2.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			275.000.000
	Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	Program Penelitian dan Pengembangan	275.000.000
3.	NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM)			627.027.600
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.104.000
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	156.713.600
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.310.000
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.900.000
	JUMLAH			3.530.689.300

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Tabel 2.4 :

Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2020 setelah refokusing covid-19

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN			1.023.271.400
	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.023.271.400
2.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			96.127.500
	Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	Program Penelitian dan Pengembangan	96.127.500
3.	NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM)			287.023.000
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	192.580.800
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	86.164.532
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.960.000
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.969.100
	JUMLAH			1.446.073.332



Tabel 2.4 :
Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2020
setelah perubahan

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN			1.145.248.400
	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.145.248.400
2.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			127.282.500
	Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	Program Penelitian dan Pengembangan	127.282.500
3.	NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM)			473.503.082
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	212.688.200
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	212.885.782
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.960.000
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.969.100
	JUMLAH			1.746.033.982

Perubahan Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 telah disesuaikan dengan dinamika yang sedang berjalan, dan berupa penambahan atau pengurangan pagu anggaran, penambahan maupun perubahan desain kegiatan. Atau telah disesuaikan dengan hasil pembahasan Tim Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Purworejo tidak memperoleh dana Bantuan Keuangan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga peruntukan dana bantuan Keuangan difokuskan untuk kegiatan lain yang dapat menanggulangi dampak dari pandemi covid-19.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan pilar ketiga arah kebijakan penguatan tata kelola, Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 dapat dilihat dari capaian sasaran yang telah dilaksanakan.

A. Capaian Kinerja Bappeda kabupaten Purworejo Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada tahun 2020 Bappeda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses tersebut. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat



mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai terinci detail dalam kegiatan operasional.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2020 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan 3 (tiga) sasaran, baik yang berupa urusan maupun yang non urusan yang akan dicapai.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum pelaksanaan kerja di tahun 2020 dapat direalisasikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, atau sesuai target tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021

Indikator kinerja sasaran Bappeda diuraikan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020. Perjanjian Kinerja tahun 2020 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020 yang telah ditandatangani dan merupakan kesepakatan antara Bupati Purworejo selaku atasan langsung dengan Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020

No.	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Status capaian kinerja Indikator	Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran	
				Target	Realisasi	% capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	1	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	97	99,97	103 %	(>)	Telah tercapai
		a.	Akuntabilitas kabupaten /% realisasi kinerja (25)			24,97			
		b.	Ketepatan waktu kab (50)			50			
		c.	Ketepatan waktu perangkat daerah (25)			25			
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1	Persentase penguatan SIDa	%	100	100	100	=	Telah tercapai
		a.	Kebijakan SIDa (20)			20			
		b.	Penataan SIDa (25)			25			
		c.	Pengembangan SIDa (55)			55			
NON URUSAN									
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	1	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	=	Telah tercapai

Sumber : Hasil olahan Bappeda



Adapun rincian realisasi sasaran dan program beserta program indikator sebagai berikut :

Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, Target dan realisasi kinerja tahun 2020 tergambar dengan tabel 3.2:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Terwujudnya Perencanaan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2020			Status capaian kinerja Indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	1	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	97	99,97	103	(>)	Telah tercapai
	a.	Akuntabilitas kabupaten /% realisasi kinerja (25)			24,97			
	b.	Ketepatan waktu kab (50)			50			
	c.	Ketepatan waktu perangkat daerah (25)			25			

Sumber : Hasil olahan Bappeda

2. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 ditetapkan



melalui 3 urusan dengan 3 sasaran, didukung 6 program yang dijabarkan menjadi 23 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3:
Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Program dan Kegiatan
Tahun 2020

No	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	1	10	1.145.248.400	1.104.400.316	96,43	100
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	1	1	127.282.500	126.846.532	99,66	100
3	NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM)							
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	4	12	473.503.082	456.021.926	96,03	100
	JUMLAH		6	23	1.746.033.982	1.687.268.774	96,63	100

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Berdasarkan realisasi yang telah dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan Rencana strategis Tahun 2016-2021 di tahun 2020, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung atas keberhasilan maupun kegagalan serta langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi, Adapun analisis terhadap masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu

Sasaran ini diimplementasikan dalam 1 indikator kinerja melalui pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan dengan 1 indikator



kinerja yang didukung 1 Program dengan 10 kegiatan dan Non Urusan dengan 4 indikator kinerja yang didukung 4 program dengan 12 kegiatan dengan perincian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

a). Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah didukung 1 Program dengan 10 kegiatan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kegiatan
1	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
2	Penyusunan KLHS RPJMD
3	Fasilitasi IPDMIP
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
5	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan
7	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
8	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
9	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi
10	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha

1) Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Adanya payung hukum untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan
3. Posisi Bappeda sebagai badan perencanaan daerah dapat dimanfaatkan kewenangannya untuk melakukan intervensi terhadap capaian kinerja daerah
4. Proses perencanaan pembangunan dipublikasikan dengan cara yang menarik
5. SDM yang semakin memahami peran dan proses perencanaan pembangunan daerah



6. Adanya ketersediaan anggaran, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Purworejo maupun APBD Provinsi Jawa Tengah
7. Adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan.
8. Adanya dukungan 1 program dan 10 kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan pembangunan.

2) Hambatan / masalah :

1. Belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah dan proses perencanaan
3. Munculnya aplikasi baru terkait perencanaan penganggaran yang terpusat dari Kemendagri (SIPD) sehingga diperlukan penyesuaian lagi karena terkendala aplikasi dan jaringan komunikasi.
4. Arah pembangunan daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh SKPD dan pihak terkait

3) Solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Adanya refocusing anggaran dikarenakan pandemi covid-19 yang diarahkan untuk penanggulangan dampak covid-19
3. Dengan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait aplikasi SIPD
4. Koordinasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak terkait
5. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif untuk mengawal seluruh indikator
6. Penyesuaian terhadap pagu dan kegiatan dengan tetap mengedepankan capaian indikator kinerja Bappeda

b. Indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan

Indikator tingkat pelayanan administrasi perkantoran dengan 1 program dan 15 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan :



Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Non Urusan Cakupan layanan administrasi perkantoran

No.	Kegiatan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Pengelolaan Kebersihan Kantor
4	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
5	Pengelolaan Keamanan Kantor

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

- 1) Faktor pendukung keberhasilan
 1. Kegiatan bersifat rutin
 2. Anggaran yang tersedia mampu mengakomodir pelayanan kantor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Hambatan / masalah
 1. Penggunaan fasilitas kantor untuk pelaksanaan tugas sulit dibatasi sedangkan anggaran terbatas
 2. Jumlah personil kurang memadai
- 3) Solusi yang telah dilakukan
 1. Efisiensi dan efektifitas penggunaan fasilitas kantor dengan tetap memprioritaskan kelancaran pelaksanaan tugas
 2. Mengajukan usulan penambahan personil

c) Indikator yang terkait dengan Non Urusan

Indikator cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik dengan 1 program dan 4 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan

No.	Kegiatan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

- 1) Faktor Pendukung Keberhasilan.



1. Kesadaran semua pihak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan efisien dan efektif
- 2) Hambatan / masalah :
 1. Kurangnya komunikasi dari pegawai untuk menyampaikan keluhan terkait peralatan atau perlengkapan yang perlu dipelihara sehingga ada peralatan atau perlengkapan tertentu yang belum terpelihara.
- 3) Solusi yang telah dilakukan
 1. Dilakukan pendataan terhadap permasalahan peralatan atau perlengkapan untuk dilakukan perawatan.

d) Indikator yang terkait dengan Non Urusan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 program dan 1 kegiatan yaitu :

Tabel 3.7

Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

No.	Kegiatan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

- 1) Faktor Pendukung Keberhasilan
 1. Terdapat desain kegiatan yang melibatkan seluruh personil
- 2) Hambatan / masalah :
 2. Belum semua kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal dapat diikuti karena jumlah dana terbatas
 3. Pendidikan dan pelatihan yang ada ditahun 2020 mayoritas dilakukan secara daring
- 3) Solusi yang telah dilakukan
 1. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan urgensi dan prioritas
 4. Refokusing anggaran diklat

e) Indikator yang terkait dengan Non Urusan

Presentase Sistem Capaian Kerja dan Keuangan dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan rincian program dan Kegiatan :



Tabel 3.8

Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Merupakan kegiatan rutin
2. Tersedianya aplikasi yang memadai
3. Semua laporan dapat tersusun dan terkirim sesuai ketentuan dan tepat waktu

2) Hambatan / masalah

1. Koordinasi internal masih belum mampu menjamin ketepatan penyampaian data perencanaan dan laporan dari masing-masing bidang
2. Adanya aplikasi baru terkait perencanaan dan penganggaran sehingga diperlukan waktu dalam penyesuaian dengan aplikasi baru Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan Simda Integrated.

3) Solusi yang telah dilakukan

1. Melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan pelaporan
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait aplikasi SIPD dan Simda integrated

b. Berdasarkan Sasaran : Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sasaran ini diimplementasikan dalam Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 1 indikator kinerja Presentase penguatan SIDa yang didukung 1 program dengan 1 kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Program dan Kegiatan Indikator Presentase Penguatan SIDa

No.	Kegiatan
1	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

1) Faktor Pendukung Keberhasilan



1. Adanya dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Peraturan Bupati Purworejo tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
 2. Hasil penelitian dan Pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintah daerah
 3. Ada kegiatan DRD yang mendukung program penelitian pengembangan
 4. Masuknya SIDA dalam RPJMD 2016-2021
- 2) Faktor penghambat
1. Belum adanya sinergi yang terkoordinasi oleh seluruh unsur Litbang terkait mulai dari tingkat Pusat hingga ke Daerah
 2. Belum dimanfaatkan dan diimplementasikannya hasil-hasil penelitian
 3. Tidak dapat terlaksananya kegiatan DRD dengan output Fasilitasi Penelitian dikarenakan adanya pandemi covid-19
- 3) Solusi
1. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama kelitbangan dengan pihak terkait
 2. Penguatan kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek dengan berbagai stakeholder lainnya, baik pada OPD. Lembaga Perguruan Tinggi/akademisi
 3. Melakukan refocusing anggaran dan perubahan output kegiatan menjadi Agenda Riset.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2020, dengan pemberdayaan dan pendayagunaan PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 38 orang, 8 orang diantaranya berpendidikan S-2 dan 16 orang berpendidikan S-1, capaian indikator kinerja dapat direalisasikan sebesar 100%. Sedangkan dari sisi penggunaan sumber daya, dari pagu Belanja Langsung sebesar Rp 1.746.033.982 dan rata-rata fisik sebesar 100% maka Tingkat Kinerja SKPD sebesar 96,63% dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi dan signifikan dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Capaian fisik lebih tinggi dari penyerapan anggaran, hal



ini menunjukkan adanya efisiensi, Upaya ini akan terus dilakukan dan disinergikan dengan tugas dan tanggungjawab yang akan datang.

Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2020 secara kuantitatif sebesar Rp 58.765.208,- yang diupayakan melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan berasal dari :

- a. Adanya kesalahan dalam input kode rekening anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan.
- b. Adanya pandemi covid-19 sehingga menyebabkan tidak terserapnya anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang selama tahun 2020 dilakukan secara daring
- c. Jamuan makan dan minum sesuai kebutuhan

Adapun rincian Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya Bappeda Purworejo di Tahun 2020 berasal dari program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program dan Kegiatan	Efisiensi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,137,268.00
1	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	3,000.00
2	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,292,456.00
3	Pengelolaan Kebersihan Kantor	442,800.00
4	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	10,399,012.00
5	Pengelolaan Keamanan Kantor	0.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,486,688.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3,562.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.00
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,450,000.00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,100.00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,739,050.00



No	Program dan Kegiatan	Efisiensi
10	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	2,739,050.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	118,150.00
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan	8,850.00
12	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	109,300.00
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40,848,084.00
13	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	18,926.00
14	Penyusunan KLHS RPJMD	7,585,400.00
15	Fasilitasi IPDMIP	6,595,045.00
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	21,635,723.00
17	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	825,140.00
18	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	147,700.00
19	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	300,000.00
20	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2,613,250.00
21	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi	544,000.00
22	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	582,900.00
IV	Program Penelitian dan Pengembangan	435,968.00
23	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	435,968.00
	Jumlah Efisiensi	58,765,208.00

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja di tahun 2020 dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi, bukan berarti semua pernyataan kinerja dapat dicapai. Hampir seluruh Program dan Kegiatan di tahun 2020 telah dapat dilaksanakan secara maksimal, dari 6 program dan 23 kegiatan dengan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dengan tingkat



penyerapan anggaran sebesar 96,63% atau target kinerja dapat dituntaskan.

Rincian lebih lanjut atas analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersaji pada tabel 3.11 :



Tabel 3.11

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)	
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Kinerja
NON URUSAN								
Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	1	Pengelolaan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kerasipan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	2	Penyediaan Layanan Komunikasi,	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan Kinerja	Setelah Perubahan Kinerja	
	Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
3	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	24bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
5	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					Kinerja	Kinerja	
		berfungsi dengan baik					
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang terpelihara	7156 m ² x 6 tahun	1.271,5 m ² 42 bulan	1unit/ tahun	1unit/ tahun	1unit/ tahun
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional Roda 4 kendaraan dinas/operasional Roda 2	210 unit	11 unit 42 bln	5 unit	5 unit	5 unit
			870 unit		23 unit	23 unit	23 unit
8	Pemeliharaan	peralatan gedung kantor	162 unit	27 unit	66 unit	66 unit	66 unit



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan Kinerja	Setelah Perubahan Kinerja	
	rutin/berkala peralatan gedung kantor	yang terpelihara		dalam 42 bulan			
			30 unit	5 unit dalam 42 bulan			
			210 unit	43 unit dalam 42 bulan			
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Laptop, Printer dan scanner				8 unit	8 unit



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur bappeda meningkat kompetensi teknis dan atau manajerial	20 orang dalam 2 tahun	12 orang	10 orang	10 orang	10 orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	11 Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan SKPD (CaLK, Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Pajak, Laporan Prognosis, Laporan Fungsional, Rekonsiliasi internal	157 dokumen dalam 6 tahun	13 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kinerja
	12 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan, Laporan Tribulanan, Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum SKPD dan koordinasi dan konsultasi perencanaan SKPD dan Laporan Aksi			33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif		Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
				Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan Kinerja	Setelah Perubahan Kinerja	
			PPK dan SPIP					
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBNGUNAN DAERAH								
Meningkatnya Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Pengendalian,	Rekomendasi hasil	12 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					Kinerja	Kinerja	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Pengendalian Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian Pelaksanaan RKPD tahun n, Rekomenda hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun n-2	dalam 6 tahun				
14	Penyusunan KLHS RPJMD	KLHS RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen,	1 Dokumen	1 Dokumen
15	Fasilitasi IPDMIP	Fasilitasi Komisi Irigasi	2 dokumen dalam 2	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
					Kinerja	Kinerja	
			tahun				
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen RKPD	9 dokumen dalam 2 tahun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
17	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan	Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen dalam 2 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						20.000 eksemplar	20.000 eksemplar



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
			Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Masyarakat						
18	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 dokumen dalam 2 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen dalam 6 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif	Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja		Kinerja
	20	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6 dokumen dalam 6 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	21	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi	Bahan Perencanaan Bidang Produksi	6 dokumen dalam 6 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	22	Penyiapan Bahan Perencanaan	Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan	5 dokumen dalam 5	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



Sasaran	Program dan Kegiatan Indikatif		Indikator dan Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2020)
				Kinerja	Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Dunia Usaha	tahun				
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Program Penelitian dan Pengembangan		Prosentase Cakupan penelitian pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%
	23	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Hasil koordinasi SIDA, Data dan informasi IPTEK dan Penataan Jaringan SIDa	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen, 3 pemenang



sumber : Hasil olahan Bappeda

**B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2020 pencapaian indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana yang telah ditetapkan secara akuntabel.

Secara umum kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Tahun 2018

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.926.645.342	3.827.376.365	97,47
2.	Belanja Langsung	1.746.033.982	1.687.268.774	96,63
	Total Belanja			

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

Secara umum capaian keuangan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.827.376.365 atau 97,47% dan belanja langsung sebesar Rp. 1.687.268.774 atau 96,63% atau termasuk kategori Sangat Tinggi, namun demikian, dari 23 kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2020 rekapitulasi persebaran capaian indikator keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020

No	CAPAIAN KINERJA	JUMLAH KEGIATAN
1.	0-50%	0
2.	51%-75%	0
3.	76%-90%	2
4.	90-100%	21
	JUMLAH	23

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

Rincian lebih lanjut terhadap realisasi anggaran kegiatan tersaji pada Tabel 3.14 sebagai berikut :



Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2020

No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket	
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%		
					Capaian			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN										
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	1	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	96,5	99,89	103%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,145,248,400	1,104,400,316	96.43	
							Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	55,384,600	55,365,674	99.97	
						Penyusunan KLHS RPJMD	115,000,000	107,414,600	93.40		
						Fasilitasi IPDMIP	85,000,000	78,404,955	92.24		



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%	
					Capaian			Anggaran	Realisasi	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	654,899,600	633,263,877	96.70	
						Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	89,509,000	88,683,860	99.08	
						Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	25,000,000	24,852,300	99.41	
						Penyiapan Bahan Perencanaan	23,000,000	22,700,000	98.70	



No	Usuran/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket	
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%		
					Capaian			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Bidang Kesejahteraan Rakyat					
						Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	50,000,000	47,386,750	94.77		
						Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi	22,455,200	21,911,200	97.58		
						Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	25,000,000	24,417,100	97.67		



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%	
					Capaian			Anggaran	Realisasi	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Program Penelitian dan Pengembangan	127,282,500	126,846,532	99.66	
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	100	100	100%	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	127,282,500	126,846,532	99.66	
	NON URUSAN									
		1 Cakupan dukungan terhadap	100	100	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	212,688,200	200,550,932	94.29	
		p				Pengelolaan Surat-menyurat	11,264,200	11,261,200	99.97	



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket	
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%		
					Capaian			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
		kinerja perangkat daerah				dan Kearsipan					
						Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,892,600	73,600,144	98.27		
						Pengelolaan Kebersihan Kantor	29,644,800	29,202,000	98.51		
						Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	79,201,000	68,801,988	86.87		
						Pengelolaan Keamanan	17,685,600	17,685,600	100.00		



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket	
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%		
					Capaian			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Kantor					
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	212,885,782	210,399,094	98.83		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,280,082	20,276,520	99.98		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	66,685,600	66,685,574	100.00		
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	81,150,000	78,700,000	96.98		



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket	
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%		
					Capaian			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Kantor					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,770,100	44,737,000	99.93		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur	9,960,000	7,220,950	72.50		
						Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	9,960,000	7,220,950	72.50		



No	Urusan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket
			Target	Realisasi	%		Pagu Anggaran	Realisasi	%	
					Capaian			Anggaran	Realisasi	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37,969,100	37,850,950	99.69	
						Penyusunan Pelaporan Keuangan	11,519,000	11,510,150	99.92	
						Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	26,450,100	26,340,800	99.59	
JUMLAH							1,746,033,982	1,687,268,774	96.63	

Sumber : Hasil olahan Bappeda



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu perangkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 hal, yakni:

1. Simpulan tentang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan hambatan utama yang dihadapi.
2. Strategi peningkatan kinerja
3. Strategi pemecahan masalah dan langkah antisipati untuk pemecahan masalah.

A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo

Dilihat dari tabel pada BAB III diatas dimana angka capaian sasaran 99,97% maka tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil. Dalam hal ini juga semua kegiatan tahun 2020 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut dengan satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terjadi kesalahan nomenklatur nama kegiatan, Adapun rekapitulasi penyerapan dan capaian kinerja per program adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 1
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Bappeda tahun 2020

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316,104,000	212,688,200	200,550,932	94.29	100
	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	20,000,000	11,264,200	11,261,200	99.97	100
	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,892,600	74,892,600	73,600,144	98.27	100
	Pengelolaan Kebersihan Kantor	29,644,800	29,644,800	29,202,000	98.51	100
	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	173,881,000	79,201,000	68,801,988	86.87	100
	Pengelolaan Keamanan Kantor	17,685,600	17,685,600	17,685,600	100.00	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	156,713,600	212,885,782	210,399,094	98.83	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20,280,000	20,280,082	20,276,520	99.98	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	91,685,600	66,685,600	66,685,574	100.00	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,748,000	44,770,100	44,737,000	99.93	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	81,150,000	78,700,000	96.98	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78,310,000	9,960,000	7,220,950	72.50	100
	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	78,310,000	9,960,000	7,220,950	72.50	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75,900,000	37,969,100	37,850,950	99.69	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	23,000,000	11,519,000	11,510,150	99.92	100



NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	52,900,000	26,450,100	26,340,800	99.59	100
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,628,661,700	1,145,248,400	1,104,400,316	96.43	100
	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	160,000,000	55,384,600	55,365,674	99.97	100
	Penyusunan KLHS RPJMD	115,000,000	115,000,000	107,414,600	93.40	100
	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	334,000,000	-	-	-	-
	Fasilitasi IPDMIP	175,612,000	85,000,000	78,404,955	92.24	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	1,199,049,700	654,899,600	633,263,877	96.70	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	180,000,000	89,509,000	88,683,860	99.08	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	60,000,000	25,000,000	24,852,300	99.41	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60,000,000	23,000,000	22,700,000	98.70	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100,000,000	50,000,000	47,386,750	94.77	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi	100,000,000	22,455,200	21,911,200	97.58	100
	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	30,000,000	25,000,000	24,417,100	97.67	100
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu)	115,000,000	-	-	-	-
VI	Program Penelitian dan Pengembangan	275,000,000	127,282,500	126,846,532	99.66	100
	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	275,000,000	127,282,500	126,846,532	99.66	100
		3,530,689,300	1,746,033,982	1,687,268,774	96.63	100



Sumber : Hasil olahan Bappeda

Dilihat dari uraian diatas, dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100% maka pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil, dalam hal ini juga 25 kegiatan tahun 2020 sebelum perubahan dan menjadi 23 kegiatan setelah perubahan telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut. Sedangkan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan dapat dilakukan sesuai tahapan beserta solusinya.

B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-Kendala dalam Pencapaian

Tujuan.

Tahun 2020 merupakan kelima atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. Upaya pencapaian target sasaran telah diupayakan secara maksimal dengan hasil memuaskan. Dalam perjalanannya banyak dijumpai adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan maupun kendala-kendala yang dihadapi.

1. Faktor keberhasilan meliputi :
 - a. Ketersediaan anggaran, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang cukup.
 - b. Tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung pencapaian kinerja.
 - c. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang, serta koordinasi eksternal, lintas SKPD dan lintas daerah yang harmonis.
 - d. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya yang tinggi di Bappeda.
 - e. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta penerapannya tidak mengalami keterlambatan.
 - f. Pada tahun 2020 telah diawali penyusunan data dasar pembangunan yang berasal dari seluruh SKPD sebagai bahan analisa dan kajian rancangan awal pembangunan daerah.
2. Kendala-kendala Dalam Pencapaian Tujuan :



- a. Masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat, meskipun telah aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Personil perencanaan SKPD sering berganti.
- c. Sistem perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi baru terkait perencanaan penganggaran yang terpusat dari Kemendagri (SIPD) sehingga diperlukan penyesuaian lagi karena terkendala aplikasi dan jaringan komunikasi.
- d. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 berpengaruh terhadap kinerja dan proses perencanaan

C. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Tujuan

1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh SKPD.
2. Dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait perencanaan yang terpusat baik segi aplikasi maupun proses perencanaan sehingga terjalin komunikasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan.
3. Penyesuaian terhadap pagu dan kegiatan dengan tetap mengedepankan capaian indikator kinerja Bappeda

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, 29 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. Bambang Jati Asmara, MT., MA

Pembina Tk. I

NIP. 19641025 199703 1 003